

Penerapan *Participatory Action Research* (PAR) dalam Pendataan dan Evaluasi Kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Mahakam Ulu

Purwadi¹⁾, Syaharuddin Y.²⁾, Resi Pratiwi³⁾, Alexander Sampeliling⁴⁾, Dio Caesar Darma⁵⁾*, Muhammad Nurhikmat⁶⁾, Chandika Mahendra Widaryo⁷⁾, Fita Purwaningsih⁸⁾

*1),2),4),6)Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
Jl. Tanah Grogot, Gn. Kelua, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (75117)*

*3),5),7),8)Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi
Jl. Tanah Grogot, Gn. Kelua, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (75117)*

**Email Penulis Koresponden: diocaisardarma@unsil.ac.id*

Received: 28/01/26; Revised: 12/03/26; Accepted: 29/04/26

Abstrak

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini ditujukan untuk mendata karakteristik UMKM dan menjadikannya sebagai evaluasi bagi kebijakan pemerintah. Metode PkM diterapkan dengan PAR dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang menentukan keberhasilan kinerja UMKM di lima kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu. Beberapa hasil penting mengacu survei ditemukan. UMKM di Kabupaten Mahakam Ulu memiliki profil demografis yang seimbang, dengan 56% pemilik laki-laki dan 44% pemilik perempuan, mayoritas berusia antara 26–30 dan 36–40 tahun. Sebagian besar usaha diklasifikasikan sebagai mikro (40%) atau kecil (32%) dan beroperasi terutama di bidang agribisnis (48%) dan perdagangan (36%). Pendidikan formal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, karena pemilik memiliki pendidikan yang baik, dengan hampir setengah di antaranya pernah mengikuti pelatihan bisnis. Sebanyak 52% UMKM didirikan antara tahun 2019 dan 2023, dengan 36% di antaranya telah beroperasi selama 1–3 tahun. Modal usaha sebagian besar berasal dari dana pribadi (40%) dan pinjaman dari lembaga keuangan (52%). Kebanyakan UMKM mempekerjakan 1–4 orang dan membayar gaji bulanan berkisar antara Rp 3,6 hingga 4,5 juta. Kinerja diukur dengan Net Profit Margin (NPM), dengan sepertiga UMKM mencapai margin antara 5% dan 15%. Mengenai segmen pasar, 44% menargetkan pasar lokal, 32% pasar internasional, dan 24% pasar nasional. Namun, hanya satu UMKM yang memiliki akses ke kredit bank. Adopsi teknologi relatif tinggi (76%), dengan lebih dari setengah UMKM menggunakan sistem pembayaran digital dan media sosial untuk pemasaran, yang meningkatkan kinerja sebesar 30–50%. Terakhir, Focus Group Discussion (FGD) dalam PkM ini diarahkan sebagai pilot project pemberdayaan UMKM yang menitikberatkan pada sinergi multipihak.

Kata kunci: *Evaluasi Kebijakan, Kinerja UMKM, PAR, Pendataan, Sinergi Multipihak*

Abstract

This Community Service (PKM) program aims to collect data on the characteristics of MSMEs and use it to evaluate government policies. The PKM method employed PAR to identify aspects influencing the success of MSMEs in five sub-districts of Mahakam Ulu Regency. The survey revealed several findings. MSMEs in Mahakam Ulu Regency exhibit a balanced demographic profile, with 56% of owners being male and 44% female. The majority of owners are aged between 26–30 and 36–40 years. Most businesses are classified as micro (40%) or small (32%) enterprises, primarily operating in agribusiness (48%) and trade (36%). Formal education significantly influences MSME performance, as owners are generally well-educated, with nearly half having participated in business training. A total of 52% of MSMEs were established between 2019 and 2023, with 36%

having been in operation for 1–3 years. Business capital mainly originates from personal funds (40%) and loans from financial institutions (52%). Most MSMEs employ 1–4 people and pay monthly salaries ranging from IDR 3.6 to 4.5 million. Performance is measured by Net Profit Margin (NPM), with one-third of MSMEs achieving margins between 5% and 15%. Regarding market segments, 44% target the local market, 32% the international market, and 24% the national market. However, only one MSME has access to bank credit. Technology adoption is relatively high (76%), with more than half of MSMEs using digital payment systems and social media for marketing, which enhances performance by 30–50%. Lastly, the Focus Group Discussion (FGD) in this PKM serves as a pilot project for MSME empowerment, emphasizing multi-stakeholder synergy.

Keywords: Data Collection, MSME Performance, Multi-Stakeholder Synergy, PAR, Policy Evaluation

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, tren UMKM yang awalnya mengalami stagnasi, sekarang menjadi lebih berhasil karena mampu bertahan dari berbagai dinamika, termasuk krisis moneter (Rosyadi & Fitriadi, 2023). Namun begitu, UMKM di banyak pasar berkembang masih menghadapi sejumlah hambatan, misalnya seperti kurang memadainya fasilitas keuangan perbankan, keterbatasan modal, pengetahuan keuangan yang tidak optimal, dan kendala terkait kapasitas untuk mengeksplorasi produk keuangan baru. UMKM dapat dikatakan memainkan bagian vital dan memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia karena mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 57% (Kuleh *et al.*, 2025). Menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, UMKM dinilai memiliki kapasitas yang besar karena ketahanannya terhadap fluktuasi situasi ekonomi, seperti ketika krisis ekonomi 1997–1998 dan 2008–2009, dimana 96% UMKM tetap bertahan dari guncangan krisis (Wijaya *et al.*, 2023). Kini, pada tahun 2023, UMKM berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB Indonesia atau setara dengan Rp 9.580 triliun dengan menyerap sekitar 117 juta pekerja. Tenaga kerja di sektor UMKM mencapai 97% dari total tenaga kerja nasional.

Sebenarnya, ada kriteria tambahan pada regulasi yang mengatur tata kelola UMKM meliputi: (1) implementasi teknologi ramah lingkungan, (2) kandungan lokal, disentif dan insentif, (3) kuantitas tenaga kerja, (4) nilai investasi, (5) kekayaan bersih, dan (6) akumulasi omzet. Akan tetapi, institusi mana saja boleh merumuskan kriteria dan mengubahnya untuk kebijakan tertentu, walaupun sifatnya kontemporer. Dari sisi penjelasan itu, tidak ada perbedaan antara peraturan versi baru dengan versi yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dimana kekayaan bersih UMKM yang mulanya didefinisikan menurut hasil penjualan tahunan atau penerimaan keuntungan bersih yang diperoleh dari setelah dikurangi semua kewajiban pajak, sekarang bertransformasi dan beralih ke modal UMKM yang berasal dari pinjaman dan aset pribadi. Contoh UMKM dari skala usaha mikro adalah warung kelontong, pedagang kaki lima, dan usaha rumahan (makanan, kerajinan tangan), sementara UMKM dengan skala usaha kecil seperti toko sembako dengan beberapa karyawan, bengkel motor, dan usaha katering. Untuk UMKM berskala menengah, seperti industri kecil seperti pabrik makanan ringan, produsen pakaian skala lokal, dan sejenisnya.

Spesifikasi mengenai jumlah dan distribusi UMKM di Kabupaten Mahakam Ulu tidak tersedia dalam publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data. Hanya saja, merujuk publikasi BPS Provinsi Kalimantan Timur (2024), jumlah Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 mencapai 35.641 usaha, yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk kasus UMKM, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Provinsi Kalimantan Timur (2024) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2021–2023, jumlah UMKM dari berbagai jenjang usaha mengalami peningkatan dengan rata-ratanya berjumlah 385.320 unit. Angka tersebut diimbangi dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 16,47%. Tampak dari tahun ke tahun, jumlah UMKM Kalimantan Timur keseluruhan di 2021 adalah 344.540 unit, di 2022 adalah 351.274 unit, dan di

2023 sebesar 460.147 unit. Pertumbuhan UMKM Kalimantan Timur juga mengalami kenaikan dari 2021 ke 2022 (1,95%) dan meningkat drastis dari 2021 ke 2023 (30,99%). Secara rinci, ditelaah mengacu skalanya, usaha mikro yang paling memberikan sumbangan tertinggi terhadap jumlah UMKM, lalu di rangking ke-2 ialah usaha kecil, dan usaha menengah di rangking ke-3. Untuk persentase pertumbuhan, usaha menengah lah yang paling menonjol ketimbang kedua skala UMKM lainnya, dimana dari 2021 ke 2022 hanya 8,86%, tetapi di 2022 ke 2023 sampai menyentuh 227,96%. Dalam versi pertumbuhannya, usaha kecil sebagai skala UMKM terbesar kedua, dimana dari 2021 ke 2022 (0,07%) dan dari 2022 ke 2023 (196,57%). Meski dari usaha mikro lebih dominan dalam versi jumlah, namun persentase pertumbuhannya jauh di bawah keduanya, dimana dari 2021 ke 2022 (2%) dan dilanjutkan dari 2022 ke 2023 (26,02%). Dari segi kewilayahan, kemajuan UMKM Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari fungsi Kabupaten Mahakam Ulu itu sendiri. Ketersediaan data yang terdokumentasi secara resmi baik dalam publikasi instansi pemerintah maupun dokumen lainnya seputar jumlah UMKM secara menyeluruh tiap per kecamatan, skalanya, tenaga kerja yang terserap, modal, hingga omzet belum diperiksa secara pasti. Mengingat wilayah ini menjadi daerah otonomi yang baru berkembang pasca melakukan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di 2014 silam mengacu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang “Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur”, maka otomatis perlu mengejar ketertinggalan berbagai pilar pembangunan, termasuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola dan menghimpun data UMKM (Purwadi et al., 2024).

Sebagaimana diketahui, model PAR sudah banyak dipraktikan dan berguna bagi pendataan, pemberdayaan, dan perencanaan pembangunan di bidang UMKM dari berbagai lintas kasus. Dari Jombang (Jawa Timur), tepatnya di Desa Plemahan, PAR diperuntukkan memperluas pemasaran digital dan pemberdayaan pelaku UMKM dalam setiap tahap pelatihan, perencanaan, dan evaluasi untuk meningkatkan strategi pemasaran lokal berbasis data partisipatif dan literasi digital serta nyata (Sufaidah *et al.*, 2025). Studi lain di Desa Karangampel, Kudus (Jawa Tengah) mengoperasikan PAR untuk memeriksa kebutuhan digitalisasi UMKM melalui pengumpulan data pelaku usaha sebagai skema perencanaan pelatihan pemasaran digital yang relevan dengan keadaan komunitas UMKM setempat (Qomar *et al.*, 2022). Disatu sisi, Aziz dan Sari (2025) mengemukakan bahwa PAR membantu UMKM dalam pendataan akuntansi secara kolektif dengan merancang mekanisme pencatatan sederhana yang menopang optimalisasi perencanaan kapasitas usaha di Kecamatan Leuwiliang (Bogor, Jawa Barat). Contoh terakhir ialah PAR untuk menciptakan *database* bisnis pada UMKM di Kota Malang (Jawa Timur), dimana manfaatnya terbukti dapat memperkuat perencanaan berbasis data partisipatif (Shanty *et al.*, 2025). Mayoritas literatur yang ada mencerminkan bagaimana PAR tidak hanya melibatkan pelaku UMKM dalam proses pendataan partisipatif, namun juga mengintegrasikannya secara langsung dengan program perencanaan pembangunan untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal di lingkungan yang berbeda.

Rangkaian PkM secara spesifik difokuskan ke empat komponen. Pertama, mengenali UMKM berdasarkan skalanya meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kedua, mengklasifikasi karakteristik UMKM Kabupaten Mahakam Ulu sesuai jenisnya mencakup UMKM produksi/industri, UMKM perdagangan, UMKM jasa, UMKM agribisnis, dan UMKM kreatif/digital. Ketiga, memetakan unsur yang berpengaruh terhadap kinerja UMKM mengacu dimensi *input* (kualitas SDM pengelola, modal, dan pengalaman bisnis), dimensi proses (omzet dan ketenagakerjaan), dan dimensi *output* (pangsa pasar dan profit). Keempat, menawarkan kebijakan alternatif seputar pemberdayaan UMKM. UMKM yang didata mewakili setiap kecamatan. PkM ini dikonsentrasikan untuk mendorong implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM dan menjadi evaluasi sekaligus memperkaya pengetahuan bagi pelaku UMKM dan pedoman praktis bagi pemerintah selaku regulator agar dapat mengoptimalkan potensi sektor UMKM secara efektif. Tujuan akhir penyelenggaraan sebagai *baseline* data yang merepresentasikan kemajuan sektor UMKM berdasarkan skala dan jenisnya sesuai sasaran ke-8

yang termuat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025–2030.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

2.1. Pendekatan

PkM ini diaktualisasikan melalui metode PAR. Viatra *et al.* (2025) menyatakan bahwa PAR ialah sebuah teknik yang mengdepankan partisipasi aktif mitra dalam seluruh fase kegiatan, diawali dari mempelajari akar masalah sampai dengan tahap evaluasi. PAR diadopsi dari penelitian yang disusun oleh Kuleh *et al.* (2025), Rosyadi dan Fitriadi (2023), serta Wijaya *et al.* (2023) dan dimodifikasi mengikuti urgensi dan objektivitas PkM. Pendekatan tersebut dipilih untuk mengulas dan menarasikan gejala sosial atau perilaku manusia secara intensif yang diukur berdasarkan deskriptif–kuantitatif. Fenomena yang dibahas berfokus pada tiga kerangka. Pertama, memotret perkembangan UMKM Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan skala dan jenisnya. Skala pada bisnis UMKM mencakup: (1) usaha mikro, (2) usaha kecil, dan (3) usaha menengah. Kedua, melacak UMKM berdasarkan jenisnya yakni: (1) UMKM produksi/industri, (2) UMKM perdagangan, (3) UMKM jasa, (4) UMKM agribisnis, dan (5) UMKM kreatif/digital. Ketiga, menyelidiki komponen yang dapat memengaruhi kinerja UMKM yaitu: (1) kualitas SDM pengelola, (2) pengalaman bisnis, (3) modal, (4) omzet, (5) ketenagakerjaan, (6) profit, dan (7) pangsa pasar. Diagram alur pelaksanaan kegiatan PkM itu sendiri terpampang di Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alur Prosedur PkM

Jenis data PkM bersifat kuantitatif. Data ini berbentuk angka yang dibentuk dan dikonversi dengan frekuensi dan jumlah (unit) tertentu. Data PkM bersumber dari primer dan sekunder. Data primer dihimpun oleh tim PkM dari pihak kedua secara langsung, sedangkan data sekunder dihimpun dan diproses oleh pihak ketiga (penyedia data) melalui laporan, publikasi, atau arsip. PkM lebih banyak menggunakan data primer karena dua pertimbangan yaitu data sekunder tentang UMKM sulit terlacak dan ketepatan data terkini biasanya diperoleh melalui studi lapangan. Selain itu, data sekunder sebagai pelengkap PkM.

2.2. Lokasi dan Mitra

PkM dialamatkan pada pemilik UMKM yang berlokasi di lima kecamatan yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Daftar Kecamatan tersebut meliputi: (1) Kecamatan Long Bagun, (2) Kecamatan Long Hubung, (3) Kecamatan Laham, (4) Kecamatan Long Apari, dan (5) Kecamatan Long Pahangai. Waktu penyelenggaraan PkM berlangsung sepanjang dua bulan, terhitung dari November 2025–Desember 2025. Selain pemilik UMKM, PkM ini juga bermitra dengan pemerintah setempat. PkM ini sebagai tindak lanjut atas relevansi persolan dengan menyelami seberapa jauh kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sektor UMKM.

2.3. Teknik PkM

Karena konsep PkM diaplikasikan dengan PAR, maka pondasi paling vital adalah pendataan dan dilanjutkan dengan evaluasi kegiatan. Sesuai jenis dan sumber data dalam PAR, skema pengumpulan data dioperasikan melalui empat teknik dengan interpretasi masing-masing. Pertama, survei untuk menganalisis data melalui wawancara langsung antara tim PkM dan responden. Wawancara secara terstruktur dengan tanya-jawab dan daftar pertanyaan lengkap untuk membedah informasi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dibagikan ke responden melalui kuesioner (angket) secara terbuka dan tertutup berbentuk cetak (kertas), dimana responden memilih jawaban baik dari pilihan yang telah disediakan maupun mengekspresikan jawaban secara bebas tanpa pilihan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif seputar permasalahan dan keunggulan UMKM. Kedua, observasi melibatkan pengamatan terhadap entitas yang dikaji. Teknik ini diaplikasikan untuk memahami perilaku dan kejadian nyata. Observasi dilakukan secara partisipatif. Observasi di lapangan berbasis diseminasi nonformal yang dikreasikan lewat edukasi dua-arah kepada responden dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan. Juga, responden dapat membagikan informasi berharga lainnya (diluar kuesioner) terkait UMKM kepada tim pelaksana. Ketiga, FGD menjadi instrumen pokok untuk memfasilitasi jalannya diskusi, berbagi sudut pandang dan pengalaman, menyalurkan pendapat, dan memastikan tematik PkM dibahas dengan konstruktif. FGD diselenggarakan secara formal melalui dua tahap. Disamping wawancara dan observasi, FGD juga menghadirkan lapisan *stakeholders* (pemerintah–akademisi–media–komunitas–pengusaha/UMKM) dengan tujuan menguji dan memvalidasi materi PkM. Keempat, dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari sumber tertulis atau arsip, misalnya laporan, catatan, foto, atau rekaman lainnya. Teknik ini berguna untuk menyokong keabsahan PkM.

2.4. Sampel PAR

Sampel PkM menggunakan *snowball sampling*, dimana ini cocok dipraktikan ketika tidak diimbangi dengan dukungan data yang presisi (dalam hal ini sulit dijangkau atau tidak diketahui jumlah pastinya). Proses pengambilan sampel dimulai dengan memilih satu atau beberapa individu yang memenuhi standar tertentu, lalu mereka diminta untuk merujuk orang lain yang memiliki karakteristik serupa. Ini berlanjut hingga sampel dianggap cukup representatif. Kendati demikian, PkM ini bersifat fleksibel dengan alasan menyesuaikan situasi lapangan. Apabila skala dan jenis UMKM yang ditemukan tidak sepenuhnya terakomodasi, data tersebut diasumsikan telah mewakili ketentuan sampel. Di PkM ini, tim memulai dengan satu pemilik UMKM yang kemudian merujuk pemilik UMKM lain untuk diwawancarai. Sampel yang diseleksi untuk dijadikan narasumber adalah mereka yang berkecimpung sebagai kelompok UMKM. Komposisi sampel berdasarkan klaster wilayah. Jumlah sampel keseluruhan adalah dua puluh lima UMKM ($n = 25$) yang terbagi secara rata, sehingga setiap kecamatan mendapat proporsi sampel dengan kesempatan dan jumlah yang sama ($n = 5$).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara teknis, penyelenggara PkM ini melibatkan kolaborasi dua kampus yang berbeda yakni Universitas Mulawarman (sebagai inisiator) dan Universitas Siliwangi (tim penunjang). Tim Universitas Mulawarman bertugas menjadi observator dan pendataan lapangan. Kegiatan tersebut dilakukan di November 2025. Sementara itu, Universitas Siliwangi berperan sebagai tim pelengkap untuk membantu proses verifikasi, tabulasi, mengolah, kompilasi, sampai dengan penyajian data. Adapun langkah-langkah kegiatan PkM digelar dari rapat persiapan (Gambar 2), pengumpulan data (Gambar 3), dan FGD (Gambar 4). Setelah semua rangkaian kegiatan dilaksanakan, kedua tim berkunjung ke pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk mengadakan FGD.



Gambar 2. Rapat persiapan tim



Gambar 3. Pengumpulan data survei



Gambar 4. Kunjungan ke Pemkab Mahahakam Ulu

Pertama, Karena sampel yang diambil dari lapangan adalah rata ($N = 25$), maka setiap lokasi tersebut juga mewakili asal wilayah atau tempat tinggal para responden. Oleh karenanya, responden dari masing-masing kecamatan berjumlah 20% atau terbagi sama rata. Mengacu jenis kelamin, pemilik UMKM di Kabupaten Mahakam Ulu sedikit berimbang dengan 56% laki-laki dan 44% perempuan. Dari segi rentang usia, pemilik UMKM baik yang berumur 26–30 tahun ataupun 36–40 tahun sama-sama sebesar 24%. Selain rentang usia tersebut, juga ada kemiripan pada umur 31–35 tahun dan 41–45 tahun, dimana kedua rentang usia ini didapati sebanyak 12%. Responden dengan klasifikasi umur diatas 50 tahun mencapai 16% dan 8% berusia 45–50 tahun. Hanya 8% sisanya yang berusia kurang dari 26 tahun. Empat generasi merujuk pada tahun kelahiran, dimana Gen *baby boomers* (lahir antara 1946–1964), Gen X (lahir antara 1965–1980), Gen Y (lahir antara 1981–1996), dan Gen Z (lahir antara 1997–2012). Intinya, dengan kecenderungan usia yang tidak terpaut menonjol, pemilik dari berbagai kelompok umur mempunyai kesempatan dan peluang yang relatif sama dalam pengembangan bisnisnya.

Kedua, profil UMKM terdiri atas skala dan jenis usaha. Disini, skala UMKM terbagi menjadi empat, tampak didominasi oleh usaha mikro sebesar 40% unit. Disatu sisi, 32% usaha berskala kecil dimiliki responden, serta sisanya 20% responden mengaku menjalankan usaha berskala menengah, dan 8% dari usaha berskala super mikro. Jenis usaha yang digerakkan cukup bervariasi. Sebanyak 48% UMKM agribisnis dioperasikan di Kabupaten Mahakam Ulu. Hal tersebut menjadi sinyal bahwa sektor pertanian di wilayah ini masih menjadi andalan dan basis ekonomi. Ada 36% responden yang menjalankan UMKM perdagangan, 8% merupakan UMKM jasa, dan masing-masing sebesar 4% merupakan UMKM dengan produksi/industri maupun kreatif/digital. Khusus UMKM produksi/industri, berfokus pada kegiatan usaha ekonomi kreatif, contohnya kerajinan tangan, (souvenir khas Dayak, seni ukiran, dan sebagainya). Pada objek UMKM kreatif/digital, juga berbasis pada ekonomi kreatif yang mengarah pada *content creator* dalam mengenalkan budaya, tradisi, pariwisata, dan keragaman alam. Selama eksplorasi data, juga ditemukan bahwa UMKM jasa pada jenis usaha penginapan dan pemangkas rambut. Pada lingkup UMKM agribisnis, pendataan lapangan membenarkan bahwa setengah atau 50% responden diantaranya mengaku berwirausaha sebagai petani kebun, khususnya kebun sawit, kakao, dan karet. Secara komparatif, seperempat (25%) responden berwirausaha menjadi petani sarang walet, 17% adalah peternak ayam, bebek, dan babi, serta 8% responden ialah petani wirausaha sayur dan peladang. Pada jenis UMKM perdagangan, bahwa walaupun sama-sama berdagang berbagai kebutuhan dan peralatan rumah tangga, tetapi 78% adalah usaha toko kelontong yang masih mengandalkan mekanisme konvensional, baik mulai dari penyetoran, pemesanan, penjualan, hingga transaksi. Berkebalikannya dengan 22% usaha toko *online* yang secara teknis konsen pada interaksi perdagangan *modern*.

Ketiga, mengenai kualitas responden dalam mengelola UMKM responden. Singkatnya, kinerja UMKM sangat bergantung dari riwayat atau jejak pendidikan pemilik UMKM. Pendidikan ditinjau dari pendidikan formal, informal, dan nonformal yang ditempuh. Jenjang pendidikan formal. Tim mendapati bahwa 32% responden berpendidikan S1, 24% lainnya berpendidikan S2, dan 16% berpendidikan Diploma. Sebanyak 24% responden berlatar belakang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Juga terpotret bahwa 4% responden dengan ijazah terakhir adalah SMA/ sederajat. Menariknya, dukungan dari pendidikan informal juga menentukan kelangsungan pengelolaan UMKM. Tidak hanya mengandalkan formal, mayoritas pelaku UMKM dilengkapi dengan pendidikan informal. Hampir setengah responden, tepatnya 48% menerangkan bahwa mereka pernah mengikuti rutinitas bimbingan/ *mentoring* yang berkaitan dengan bisnis. Disamping dapat menginspirasi, keberadaan dari kegiatan seperti diskusi kelompok di lintas UMKM juga mampu membuka jalan baru sekaligus melatih kepekaan mereka tentang pengembangan usaha saat ini. Sebanyak 36% responden terlibat dalam diskusi kelompok UMKM dan 16% lainnya menyatakan justru tidak pernah mengikuti pendidikan informal apapun. Pada hakikatnya, pendidikan nonformal merupakan jenis pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal (sekolah dan universitas), namun tetap terstruktur dan terencana. Pendidikan jenis ini tidak hanya berpusat pada pengetahuan, namun juga keterampilan dan nilai-

nilai kepada individu dalam rangka mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kualitas hidup. Setara dengan lingkup lainnya, skala bisnis (termasuk UMKM), pendidikan nonformal dikonsentrasikan pada kursus kewirausahaan, pelatihan keterampilan, *workshop*, dan sosialisasi kewirausahaan. Ditemukan bahwa 32% responden pernah mengikuti kegiatan itu, *workshop* (24%), kursus kewirausahaan (12%), dan pelatihan keterampilan (12%). Seperlima responden (20%) justru menyatakan belum pernah mengikuti jenis pendidikan nonformal apapun.

Keempat, berbicara tentang pengalaman yang dimiliki responden selaku pemilik UMKM. Layaknya kebanyakan model usaha lainnya, pengalaman menjadi elemen yang harus diperhitungkan bagi kelangsungan UMKM. Pengalaman usaha ditelaah dari tahun pendirian dan rentang waktu merintis, akan memperkuat konsistensi dalam berbisnis. Pengalaman usaha berdasarkan dua komponen diatas. Mengacu tahun pendiriannya, dari 25 pemilik UMKM yang ada, 52% responden mendirikan UMKM sejak 2019–2023, 28% responden dibawah tahun 2014, 16% responden mendirikan UMKM direntang 2014–2018, serta 4% memulai usaha diatas tahun 2023. Pengalaman bisnis berdasarkan rentang waktu merintis, merintis usaha, dan hingga sukses, mayoritas memerlukan waktu setidaknya 1–3 tahun (36%). Sebanyak 28% responden membutuhkan waktu lebih dari 8 tahun, 16% menyatakan butuh sekitar 6–8 tahun, kurang dari 1 tahun (12%), dan 4–6 tahun (8%). Rentang waktu untuk merintis, membangun usaha, dan keberhasilan UMKM sebagai potret bahwa durasi waktu menjadi satu diantara hal esensial bagi pemilik UMKM.

Kelima, berkenaan dengan sumber modal usaha dan perolehannya dari hasil penjualan tahunan (termasuk aset bersih, kredit, dan sebagainya). Menyelami penelusuran di lapangan, 52% modal usaha masih dominan berasal kredit lembaga keuangan. Untuk kasus di Kabupaten Mahakam Ulu, mayoritas pemilik UMKM mendapatkan bantuan pinjaman keuangan dari *Credit Union*. Dewasa ini, *Credit Union* atau istilahnya dalam versi Indonesia “koperasi kredit”, berperan sebagai penyalur kredit usaha. Hanya saja, lembaga tersebut dikelola oleh pihak swasta yang tentu berbasis *profit oriented*. Sebelum masuknya lembaga-lembaga penopang usaha, *Credit Union* terlebih dahulu masuk ke Kabupaten Mahakam Ulu sejak tahun 2000-an dan lebih populer dimata pengusaha. Melalui kemudahan akses perihal layanan, *Credit Union* memastikan bahwa modal dapat dicairkan lebih cepat dengan proses adminitrasi yang lebih fleksibel. Sisanya, 20% responden menggarisbawahi bahwa mereka mendanai usahanya dengan tabungan secara mandiri, 12% modal UMKM berasal dari hibah (tanpa pengembalian) sebagai bagian dari program pemerintah, 8% modal bersumber dari pembiayaan Koperasi Unit Desa (KUD), serta 8% dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank pemerintah dan CSR perusahaan. Sebagaimana dipahami, modal usaha merujuk pada penjualan tahunan, dimana 40% responden mengklaim bahwa usaha yang mereka jalankan saat ini dihimpun secara mandiri atau tanpa modal. Kebanyakan roda bisnis UMKM ditunjuang oleh modal pemilik sendiri, sementara 32% UMKM dengan modal usaha lebih kecil dari Rp 1 miliar, 24% lainnya ditopang oleh modal berkisar Rp 1 miliar–Rp 5 miliar, dan 4% modal usaha yang digelontorkan sebesar diatas Rp 5 miliar–Rp 10 miliar.

Keenam, menyangkut ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merujuk pada jumlah pegawai/karyawan yang diberdayakan dalam pengoperasian roda UMKM dan upah rata-rata dalam sebulan. Pada skala ketenagakerjaan, 44% responden menyatakan bahwa mereka melibatkan 1–4 orang karyawan atau ini terkategori sebagai UMKM skala mikro. Adapun 36% responden lainnya mengaku tanpa mempekerjakan karyawan atau mengoperasikan UMKM secara sendiri. Biasanya, pengerjaan mandiri untuk UMKM skala super mikro. Terdapat 16% responden lainnya yang mempekerjakan 5–19 orang karyawan pada UMKM kecil dan hanya 4% dengan dukungan 20 orang–99 orang karena UMKM-nya berskala menengah. Biaya upah yang dikeluarkan oleh pemilik UMKM kepada karyawan didasarkan pada UMK per bulan, tetapi bergantung pada kemampuan dan kapasitas produksi. Selama penyelidikan, 32% pemilik UMKM menggaji karyawan dengan nominal upah Rp 3.600.001–Rp 4.500.000 per bulan dan 28% pemilik UMKM memberi upah Rp 3.600.000 per bulan. Sebanyak 28% pemilik UMKM memberikan upah Rp 4.500.001–Rp 5.400.000 per bulan dan 12% lainnya berani mengeluarkan

melebih itu, dengan upah melampaui Rp 5.400.000 per bulan. Padahal, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sudah menetapkan standar UMK untuk tahun 2025 ini sebesar Rp 3.953.233.

Ketujuh, perihal profit usaha. Satu diantara tolak ukur dari kesuksesan UMKM dapat dilihat dari NPM untuk menelaah kesehatan keuangan sebuah UMKM. Intinya, NPM menunjukkan seberapa besar laba bersih yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan setelah dikurangi semua biaya, termasuk biaya operasional, pajak, bunga, dan lain-lain. Secara kuantitatif, 32% UMKM mempunyai NPM rata-rata diantara 5%–15%, sebanyak 28% UMKM dengan NPM rata-rata mencapai 16%–25%, 12% UMKM dengan NPM rata-rata 26%–35% maupun 36%–45%, serta 8% UMKM dengan NPM rata-rata kurang dari 5% dan lebih dari 45%. Dari sini, dapat dipelajari bahwa jika NPM pada beberapa UMKM di atas 45%, mengindikasikan bahwa UMKM tersebut memiliki laba bersih yang sangat tinggi dibandingkan dengan pendapatannya. Ini adalah sebuah prospek yang positif, tetapi juga perlu dicermati lebih lanjut.

Kedelapan, membahas pangsa pasar usaha. Pangsa pasar merujuk pada segmentasi penjualan dan pemasaran untuk membantu bisnis fokus pada siapa targetnya dan seberapa kuat posisi produk atau komoditas laku di pasaran. UMKM di Kabupaten Mahakam Ulu tentu mempunyai komoditas yang diperdagangkan dengan lintas pangsa pasar. Pada aktualisasinya, dari 25 UMKM yang diteliti, 44% diantaranya memiliki segmentasi penjualan dan pemasaran di tingkat lokal. Terdapat 32% UMKM dengan orientasi pemasaran ke tingkat internasional serta 24% UMKM dengan segmentasi penjualan dan pemasaran di tingkat nasional.

Kesembilan, mempelajari lebih rinci mengenai modal UMKM yang berasal dari perbankan. Bagian ini juga merupakan fase lanjutan yang diperuntukkan untuk menavigasi bagaimana peran perbankan dapat mendorong dan membantu kinerja UMKM dari sisi permodalan mencakup: (1) bank yang meluncurkan modal, (2) jenis kredit pinjaman, dan (3) besaran modal. Faktanya, karena hanya satu UMKM yang akses modalnya dari perbankan, maka dapat dengan mudah dideteksi. UMKM tersebut memperoleh permodalan dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim dalam bentuk KUR super mikro dengan besaran Rp 10 juta–Rp 100 juta.

Kesepuluh, menekankan pada UMKM yang bertumpu pada akses digital melalui melibatkan perangkat teknologi dalam pengoperasian bisnis, ragam teknologinya, dan perubahan pasca mengadopsi teknologi tersebut. Partisipasi perangkat teknologi. Secara statistik, 76% responden menyatakan bahwa UMKM mereka mengadaptasi perangkat teknologi dan 24% lainnya belum menggunakan atau berstatus tradisional. Penting untuk diingat bahwa perangkat teknologi sebagai atribut dari ekstensifikasi untuk memperluas jejaring sosial. Perangkat teknologi yang diaplikasikan dalam memacu kinerja bisnis. Khusus dari pemilik UMKM yang menggunakan perangkat teknologi, 53% responden mengungkapkan bahwa mereka sudah menjalankan sistem pembayaran digital, misalnya *e-Wallet*, *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), dan lainnya untuk memudahkan kelancaran sekaligus kehadirannya dapat menjamin keamanan setiap transaksi. Wawasan berharga lainnya ditemukan perihal pemilik UMKM yang bertumpu pada dukungan perangkat teknologi, dimana 42% diantaranya memakai saluran pemasaran seperti *Instagram*, *Facebook* (FB), dan sejenisnya untuk keperluan promosi, distribusi, dan penjualan produk. Selaras dengan pengadopsi media sosial, 5% diantara pemilik UMKM yang mengadopsi teknologi cenderung memberdayakan *e-commerce*, *marketplace*, dan lainnya. Disamping untuk mengenalkan, mendata, mengontrol, sampai dengan mengirim produk, juga dapat menciptakan *branding* secara elektronik ke pelanggan. Kemajuan pasca kehadiran teknologi. Melalui kehadiran teknologi-teknologi yang disebutkan di atas, khusus pemilik UMKM sebagai pengadopsi mengaku ada *progress* yang mencolok. Teknologi membawa tren positif karena 44% diantaranya mengatakan bahwa kinerja UMKM sekarang ini mengalami kemajuan *moderate* hingga 30%–50% dan 8% dengan kemajuan yang tergolong tinggi mencapai lebih dari 50%. Ironinya, 24% UMKM di Kabupaten Mahakam Ulu justru diketahui dengan kemajuan yang rendah akibat kurang handalnya memahami dan menjalankan perangkat teknologi.

Kabupaten Mahakam Ulu memiliki potensi besar pengembangan UMKM berbasis sumber daya lokal, ekonomi kreatif, dan pariwisata budaya yang memerlukan percepatan pemberdayaan secara sistemik dan berkelanjutan melalui multipihak yang melibatkan pemerintah daerah,

pelaku bisnis, instansi vertikal pemerintah pusat, akademisi, komunitas/masyarakat, media, dan UMKM itu sendiri, dengan dukungan regulasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pendekatan melalui FGD dirancang sebagai *pilot project* untuk membangun ekosistem UMKM yang terintegrasi, produktif, dan berdaya saing melalui pembagian peran yang jelas. Pemerintah sebagai penyedia kebijakan, pendataan, dan fasilitasi. Pelaku bisnis sebagai penyedia pembiayaan, kemitraan, dan akses pasar. Akademisi sebagai penyedia riset dan pendampingan. Komunitas sebagai penggerak partisipasi berbasis lokal. Lalu, media sebagai sarana promosi dan edukasi. Melalui kolaborasi multipihak tersebut, multipihak diharapkan mampu mempercepat UMKM untuk naik kelas secara digital, finansial, dan legal, menghasilkan ekosistem UMKM berbasis wilayah dan klaster, data UMKM yang terintegrasi, serta mendorong terwujudnya ekonomi lokal yang kokoh dan inklusif.

4. KESIMPULAN

PkM ini merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk memetakan kondisi dan karakteristik UMKM sebagai dasar perencanaan pemberdayaan yang selaras dengan misi peningkatan taraf hidup masyarakat berbasis potensi sumber daya alam. Hasil PkM menunjukkan bahwa UMKM di Mahakam Ulu memiliki profil demografis pemilik yang relatif berimbang, skala usaha yang beragam dengan dominasi mikro dan kecil, serta jenis usaha yang didominasi agribisnis dan perdagangan. Kinerja UMKM dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman usaha pemilik, akses terhadap pendampingan dan pelatihan, serta kemampuan mengelola permodalan yang sebagian besar masih bertumpu pada modal sendiri dan lembaga keuangan nonperbankan. Dari sisi ketenagakerjaan, banyak UMKM beroperasi secara mandiri atau dengan jumlah pekerja terbatas, dengan tingkat upah yang bervariasi. Profitabilitas usaha berada pada kisaran moderat hingga baik, dengan jangkauan pasar yang mencakup lokal, nasional, hingga internasional. Akses perbankan formal masih terbatas, sementara adopsi teknologi digital termasuk pembayaran non-tunai dan pemasaran melalui media sosial mulai berkembang dan memberikan dampak positif terhadap kinerja usaha, meskipun sebagian UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi secara optimal. Melalui FGD, kebijakan prioritas didesain dengan melibatkan multipihak untuk memperkuat pemberdayaan UMKM di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu atas dukungan pendanaan, sehingga PkM ini dapat berjalan dengan lancar. Kami juga mengapresiasi para pelaku UMKM di Kabupaten Mahakam Ulu yang berkenan meluangkan waktu dan atensinya selama proses survei.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A., & Sari, S. P. (2025). Pendampingan dalam membangun sistem akuntansi sederhana bagi UMKM di Kecamatan Leuwiliang. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(2), 270–285. <https://doi.org/10.30997/qh.v11i2.21202>
- BPS Provinsi Kalimantan Timur. (2024). *Profil industri mikro dan kecil Provinsi Kalimantan Timur 2023, volume 5*. BPS, Samarinda.
- DPPKUKM Provisi Kalimantan Timur. (2024). Data UMKM Provinsi Kaltim tahun 2021–2023. Tersedia di <https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-umkm>
- Kuleh, Y., Setiawan, E., & Rachmawaty, A. (2025). Productivity of SMEs in the wood processing industry: Case from "gen Y" in PPU and Kutai Kartanegara, East Kalimantan. *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 24(01), 137–160. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.24.01.137-160>

- Purwadi, P., Sampeliling, A., & Y, S. (2024). Mapping of creative economy commodities sourced from local wisdom; Case in Mahakam Ulu. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 22(2), 100242–100258. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00773>
- Qomar, M. N., Karsono, L. D. P., Aniqoh, F. Z., Aini, C. N., & Anjani, Y. (2022). Peningkatan kualitas UMKM berbasis digital dengan metode participatory action research (PAR). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 74–81. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i1.3494>
- Rosyadi, R., & Fitriadi, F. (2023). Rethinking and design facilitating pillars SME performance: An illustration for Indonesia. In *Kaya, M. V. and Bayrakdar, S. (Ed.). Social and Economic Studies within the Framework of Emerging Global Developments Vol. 3*, Peter Lang, Lausanne, pp. 169–179. <https://doi.org/10.3726/b20968>
- Shanty, B. M., Satiti, N. R., & Irawati, S. (2025). Development of a business database and clustering of Aisyiyah family enterprises to strengthen ISWARA membership in Malang City. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 508–513. <https://doi.org/10.32815/jpm.v6i2.2758>
- Sufaidah, S., Widya, M. A. A., Anandita, S. R., Masyhari, M. F., Ubaidillah, U., Joyo, S. S. D., & Syafi'udin, A. (2025). Implementasi participatory action research dalam pemberdayaan UMKM Desa Plemahan melalui digital marketing. *Jumat Informatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 113–117. <https://doi.org/10.32764/abdimasif.v6i2.6342>
- Viatra, A. W., Febriyanti, D., Ratu, M. K., Prasetya, D., Yazid, I. M., Yola, L. F., & Wulandari, F. (2025). Pemberdayaan komunitas Forum Wirausaha Jumputan Muda (FORJUMA) melalui inovasi eco jumputan untuk mendorong ekonomi kreatif berbasis budaya berkelanjutan. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 9(3), 551–560. <https://doi.org/10.36982/jam.v9i3.6230>
- Wijaya, A., Jiuhardi, J., ZA, S. Z., Nurjanana, N., & Kurniawan, E. A. (2023). Determinants on small scale business: An empirical evidence from Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(1), 305–314. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180132>